

BULETIN KNTI CADIK NELAYAN

SENIN, 20 OKTOBER 2025

www.knti.or.id

Nilai Tukar Nelayan Terus Turun Sejak 2022

Turunnya nilai tukar menunjukkan pendapatan nelayan tidak sebanding dengan biaya hidup dan biaya melaut yang terus meningkat. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti menurunnya kesejahteraan nelayan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) cenderung turun sejak 2022. "Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan tren penurunan NTN sejak 2022. Meski ada sedikit perbaikan pada Agustus 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi nelayan tetap lebih buruk dibandingkan masa pandemi," kata Dani dalam keterangan tertulis memperingati Hari Pangan Sedunia, Kamis, 16 Oktober 2025 (Tempo)



Darurat Udag Nasional dan Aksi Pemulihan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menerbitkan peringatan impor (*import alert*) #99-51 pada 18 September 2025. *import alert* FDA ini untuk pertama kali mewajibkan Pemerintah Indonesia yang menetapkan lembaga Certifying Entity (CE) yang diakui FDA untuk menerbitkan sertifikat bebas radioaktif sebagai persyaratan impor tambahan untuk pasar AS. sertifikat khusus pengiriman yang dikeluarkan oleh CE atau perwakilan yang ditunjuk harus dikirim langsung ke FDA melalui Import Trade Auxiliary Communications System (ITACS) untuk setiap pengajuan entry shipment. FDA dapat langsung mencocokkan sertifikat dengan pengiriman tertentu (Kompas.id)



Nelayan Minta Pemerintah Bentuk Bulog Perikanan



Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah membentuk badan urusan logistik atau Bulog Perikanan sebagai lembaga yang mengurus pangan laut. Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan pembentukan Bulog Perikanan penting untuk menstabilkan harga ikan dan menjamin pendapatan nelayan. Menurut Dani, lembaga tersebut bisa memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai offtaker hasil tangkapan nelayan. Kedua, sebagai cadangan pangan perikanan nasional (Tempo)

Kerentanan Perempuan Nelayan di Tengah Krisis Iklim



Perempuan nelayan memainkan peran penting dalam perikanan Indonesia. Pemerintah masih belum mengakui dan melindungi perempuan nelayan dalam kebijakan perikanan dan kelautan. Mereka seringkali terpinggirkan dari berbagai bantuan dan jaminan sosial. Padahal peran mereka sangat strategis dalam rantai pasok perikanan. Krisis iklim juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini juga mendorong praktik pernikahan anak sebagai jalan keluar dari kemiskinan (Mongabay)



@dppknti



@nelayan_bersatu



knti.or.id

Warga Terus Tuntut Cabut Izin Proyek Pulau Buatan Surabaya



Proyek pulau buatan bertajuk Surabaya Waterfront Land (SWL) di pesisir timur Surabaya terus berlanjut di tengah derasnya penolakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menerbitkan Dokumen Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk meloloskan proyek tersebut. ratusan warga pesisir yang terdiri dari nelayan, petani tambak, pelaku usaha perikanan dan mahasiswa mendatangi Balai Kota Surabaya. Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah mencabut dokumen PKKPRL yang KKP terbitkan. (Mongabay)

Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp5,17 Miliar ke Singapura Digagalkan

Penyelundupan 172.611 benih bening lobster ke Singapura digagalkan Bea Cukai Soekarno-Hatta. berdasarkan hasil pemeriksaan didapati 52.400 ekor benih lobster jenis pasir pada koper milik PA, 32.287 ekor benih lobster jenis pasir pada koper milik MR, 40.000 ekor benih lobster jenis pasir pada koper milik SA, dan 47.924 ekor, dengan rincian 46.342 benih lobster jenis pasir dan 1 bungkus berisi 1.582 benih lobster jenis mutiara pada koper milik DO. benih lobster merupakan komoditas yang dibatasi ekspornya dan memerlukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (MetroTv)

Komisi IV dan NPC Tiongkok Bahas Sinkronisasi Regulasi Perikanan

Komisi IV DPR RI menerima kunjungan kehormatan (reciprocal visit) dari delegasi National People's Congress (NPC) Republik Rakyat Tiongkok di Ruang Delegasi, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis mengenai sinergi regulasi dan kerja sama antarnegara di bidang perikanan dan kelautan. "Mereka (NPC) sedang menyesuaikan undang-undang perikanan dengan kemajuan zaman, tanpa melupakan kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia," ujar Alien Mus usai pertemuan.

Kegiatan DPD KNTI

- DPD KNTI Pemalang mengikuti FGD "Menuju kapasitas tata kelolah perlindungan dan penetapan awak kapal perikanan migran dalam kewenangan daerah, nasional, regional dan internasional"
- DPD KNTI Semarang menerima kunjungan Ibu Tina Talisa, Staf Khusus wakil presiden RI
- DPD KNTI Serdang Bedagai melakukan pelestarian hutan mangrove

Dokumentasi Nelayan



Kalender Nelayan

- 21 Okt 2025** • DPD KNTI karawang Melakukan sidang lanjutan gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Karawang

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN

Benih bening lobster merupakan (BBL) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva). Benih bening lobster memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan merupakan komoditas yang menjanjikan di sepanjang pantai selatan Indonesia, seperti Sumatera dan Jawa. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekspor BBL diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan. Namun, kekhawatiran mengenai penyelundupan BBL masih terjadi saat ini.

Cadik merupakan buletin mingguan yang diterbitkan oleh DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai media informasi dan meningkatkan literasi isu kelautan dan perikanan.

Penanggung Jawab
Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI

Redaktur :
Rahmadanis, Jan Tuheteru, Niko Amrulloh

Penata Letak
Rahmadanis



@dppknti



@nelayan_bersatu



knti.or.id